

ANALISIS KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DONGGALA

Andi Rita Lembah

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This study aims to determine the performance of the Food Security How Donggala. This study used a qualitative approach to the informant as much as five (5) persons within the Food Security Agency Donggala. Data collected by using observation, meaning that the researchers directly observed according to a predetermined location research. Location research done purposively. The collected data were analyzed in stages based on the data information from the informant obtained through observation, interviews and documentation. The results showed that all five aspects used in measuring the performance of the Food Security Donggala in the public service, namely productivity, quality of service, responsiveness, responsibility, and accountability, There are three aspects that have not been going well, namely Productivity Aspect, Aspect and Aspect Quality of Service Accountability. Yet all three of these aspects very significant effect on the performance of the Food Security District. In the aspect of productivity is still a lot of programs and services that are not run effectively and efficiently in the implementation of the basic tasks and functions of the Food Security Donggala. For the aspects of quality of service, level of education and experience factors Food Security Agency employee Donggala still low so that affects the run basic tasks and functions. While the aspect of accountability is not going well, this is due to lack of understanding of employees who do not obey the rules set by the head.

Keywords: *Performance, Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility, and Accountability*

Salah satu masalah besar bagi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia pada era otonomi dewasa ini adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya di daerah. Menyadari hal tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk diprioritaskan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negative dari suatu kebijakan operasional. Mink (1993 : 27) mengemukakan pendapatnya bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya : a) berorientasi pada prestasi, b) memiliki percaya diri, c) berpengendalian

diri, d) kompetensi. Penilaian kinerja bertujuan untuk menilai seberapa baik pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dan apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi lebih baik dimasa mendatang. Ini dilaksanakan dengan merujuk pada isi pekerjaan yang mereka lakukan dan apa yang diharapkan untuk mencapai setiap aspek dari pekerjaan mereka (Rivai et.al, 2011: 17).

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja karyawan. Selama ini banyak instansi pemerintah yang belum mempunyai karyawan dengan kompetensi yang memadai, ini dibuktikan dengan rendahnya produktivitas

karyawan dan sulitnya mengukur kinerja karyawan di lingkup instansi pemerintahan (Nurmianto, Siswanto, 2010: 27).

Badan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat (BKP) Donggala adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Donggala yang menyelenggarakan tugas yang berkaitan dengan ketahanan pangan. BKP merupakan salah satu badan/kantor yang sangat besar peranannya dalam pembangunan. Sebagai bukti peranan lembaga dimaksudkan, secara jelas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan menjelaskan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya adalah hak azasi setiap rakyat yang harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Tugas yang dilaksanakan BKP Kabupaten Donggala berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2010 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten Donggala Paragraf 8 Pasal 18 yang berbunyi (1) BKP bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan, (2) Dalam penyelenggaraan tugas, BKP mempunyai fungsi : a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan, b. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pangan, c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pegawai pada Badan Ketahanan Pangan berjumlah 48 orang, yang terdiri atas 23 PNS dan 25 tenaga honorer yang sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan diantaranya yaitu: 1) Koordinasi dewan ketahanan pangan dan penyusunan peta kerawanan pangan, 2) Pembinaan pangan

olahan, promosi pangan dan rumah pangan lestari, 3) Pengembangan keamanan pangan segar dan hari pangan sedunia (HPS), 4) Pemantauan harga pangan masyarakat, 5) Intervensi daerah rawan pangan desa mandiri pangan, 6) Pembinaan lembaga distribusi pangan dan pemantauan harga pangan masyarakat.

Mengingat sangat kompleksnya tugas dan fungsi BKP Kabupaten Donggala, maka Kinerja BKP Kabupaten Donggala harus terpelihara dengan baik dan berjalan lancar, karena keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di daerah akan terlaksana jika pelayanan dilakukan secara baik. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut, ternyata masih belum juga menunjukkan hasil kerja yang optimal karena selama ini Pemerintah daerah belum dapat mewujudkan ketahanan pangan yang mutunya aman, bergizi, beragam, merata.

Kebanyakan BKP di Indonesia, tentu masih bekerja dengan sarana dan sumber daya manusia yang masih terbatas. Dalam keadaan seperti ini BKP Kabupaten Donggala menyusun sebuah rencana pengembangan sarana dan sumber daya manusia untuk mendekati kondisi yang diinginkan. Karena bertambahnya fasilitas maupun Staf yang profesional di BKP akan menjadi sarana bagi kinerja BKP Kabupaten Donggala yang lebih baik di masyarakat. Selain itu juga upaya-upaya pengembangan BKP Kabupaten Donggala akan memungkinkannya melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan terhadap masyarakat secara profesional.

Kinerja BKP Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya kurang optimal, ini disebabkan kualitas tingkat pendidikan formal maupun non-formal aparatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan Pegawai sebanyak 23 orang terdiri dari Gol. IV 5 orang, Gol. III 13 orang, Gol. II 5 orang. Sedangkan tenaga Honorer berjumlah 25 orang (PHL), jadi seluruhnya berjumlah 48 orang. Dari 23 orang PNS di Badan

Ketahanan Pangan pada tahun 2014 berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut : Strata 2 adalah 1 orang, Strata 1 sebanyak 5 orang, Sarjana Muda/Diploma III yaitu 1 orang serta selebihnya rata-rata berijazah SLTA sebanyak 16 orang. Dari data awal tersebut nampak bahwa kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kurang optimal dari segi kualitas pelayanan, produktivitas, dan akuntabilitas karena factor yang mendominasi adalah tingkat pendidikan SLTA.

Selama ini, pelayanan memang cukup menentukan kinerja BKP Kabupaten Donggala, terutama terkait dengan tingkat produktivitas dan akuntabilitas. Hal inilah yang menjadi permasalahan dasar pada kinerja BKP Kabupaten Donggala dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang ketahanan pangan. Tiga faktor tersebut berdampak pada kualitas pendidikan formal dan informal yang dimiliki oleh BKP Kabupaten Donggala. Faktor kualitas pelayanan berdampak pada produktivitas kinerja BKP Kabupaten Donggala, sehingga berakibat pada kurangnya akuntabilitas aparatnya tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun, demikian berdasarkan hasil penelitian faktor responsivitas dan responsibilitas terhadap tugas dan fungsinya cukup bagus karena aparat BKP Kabupaten Donggala patuh terhadap peraturan atau kebijakan peraturan daerah dan arahan para pejabatnya. Aparat BKP cukup respon terhadap tuntutan kerja yang selama ini yang dibebankan pekerjaan dari semua Bidang pada BKP Kabupaten Donggala. Hanya saja, keterbatasan kualitas individu pegawai yang kurang mendukung dalam meningkatkan kinerjanya.

Dalam ruang lingkup hubungan kerja, BKP Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat berat, Namun tidak didukung kemampuan kualitas pegawai yang memadai.

Demikian pula sarana prasarana pendukung tidak tersedia yang dapat mendukung kinerja dalam menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah tersebut. Fasilitas pendukung seperti computer (laptop) dan kendaraan operasional belum memadai berdasarkan tingkat kebutuhan, padahal beban kerja begitu besar. Tuntutan Bupati dan jajarannya kepada BKP Kabupaten Donggala begitu luas, tapi tidak didukung kualitas pegawai yang professional dibidangnya dan jumlah pegawai yang memadai sesuai dengan tuntutan pekerjaan BKP Kabupaten Donggala, seperti halnya tuntutan pelayanan minimal Bidang ketersediaan Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam yang tersebar merata diseluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Tingkat produktifitas begitu rendah, sehingga kadang mendapat sorotan dari anggota Legislatif Kabupaten Donggala. Oleh karena itu, ketiga hal inilah yang harus diperbaiki ke depan. Dengan demikian judul tesis ini adalah *Analisis Kinerja Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Donggala*". Sedangkan tujuan penelitian adalah :

- 1) Untuk mengetahui Kinerja Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mewujudkan Ketahanan Pangan.
- 2) Memberikan masukan pada Pemerintah Kabupaten Donggala guna meningkatkan Kinerja Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan Ketahanan Pangan.

Dasar teori dari Agus Dwiyanto (2006) yakni:

- 1) Produktivitas, Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep

produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

- 2) Kualitas Layanan, Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dan organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap Layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.
- 3) Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- 4) Responsibilitas, dalam hal ini menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun yang implisit.
- 5) Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan beberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholders*. Nilai dan norma pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut di antaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi

manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa.

Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi: (1) acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa; (2) tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; dan (3) dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.

METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, Menurut Sugiyono (2013:49-53) yakni memberikan gambaran secara jelas dan faktual mengenai Kinerja Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Donggala. Agar peneliti memperoleh data dan informasi yang tepat, maka dalam penelitian ini ditetapkan informan secara purposive. Untuk itu ditetapkan Informan sebanyak 5 orang yakni Kepala BKP, Sekretaris BKP, Kepala Sub Bagian BKP Kepala Bidang BKP dan Staf BKP.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa teknik yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek yang di bahas pada penelitian ini adalah kinerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Khususnya melihat pada kinerja pegawai dengan menggunakan pendekatan pada teori yang dikembangkan oleh Dwiyanto (2006). Teori ini di gunakan oleh penulis untuk menganalisis Kinerja Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Donggala karena baik locus dan fokus penelitian ini cocok dengan teori dari Agus Dwiyanto. Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut ini di uraikan pembahasan dan analisis dari masing-masing konsep kinerja dari Dwiyanto (2008) sebagai berikut:

1. Produktifitas

Produktivitas, merupakan efesiensi dan efektifitas pelayanan BKP Kabupaten Donggala dalam memberikan kualitas pelayanan kinerja terhadap Masyarakat Kabupaten Donggala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Produktivitas ini pula merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja BKP Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya untuk mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam yang tersebar merata diseluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Maka dari itu untuk mengetahui tentunya peneliti melakukan wawancara ke beberapa informan terkait masalah produktivitas kinerja pegawai BKP Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai perpanjangan dari Kepala daerah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hari Soetjahyo.S.Pt sebagai Kepala BKP Kabupaten Donggala, yang mengatakan bahwa:

“Saya mengakui bahwa memang benar di BKP Kabupaten Donggala ini belum dapat dikatakan pelayanan yang efektif dan efesien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Karena BKP sebagai SKPD yang menangani kerawanan pangan untuk Kabupaten Donggala

ini belum dapat secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang tentunya akan selalu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Dan untuk mengatasi hal ini diperlukan kerjasama seluruh lembaga terkait”. (wawancara 16 Pebruari 2015).

Produktivitas di BKP Kabupaten Donggala ini masih sangat rendah, Karena BKP Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap publik. Padahal produktivitas dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana kinerja BKP Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, penting kiranya dilakukan untuk dilakukan perbaikan terhadap kinerja BKP Kabupaten Donggala demi terciptanya kinerja yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap publik.

Sementara Suriani, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BKP Kabupaten Donggala mengatakan bahwa: *“tidak efektif dan efisiennya kinerja BKP Kabupaten Donggala ini disebabkan karena produktivitas yang masih sangat lemah. Sehingga hal inilah yang membuat kinerja BKP Kabupaten Donggala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengalami berbagai macam masalah didalamnya seperti tidak efektif dan efisiennya pelayanan dan penanggulangan kerawanan pangan di Kabupaten Donggala.* (wawancara, 18 Pebruari 2015).

Produktivitas merupakan efesiensi dan efektifitas kinerja BKP Kabupaten Donggala dalam memberikan pelayanan. Produktivitas ini pula merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja BKP Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya di Kabupaten Donggala itu sendiri. Maka dari itu produktifitas ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja BKP Kabupaten Donggala.

Berdasarkan dari beberapa informan diatas mengakui bahwa produktivitas kinerja

pegawai di BKP Kabupaten Donggala ini masih sangat lemah. Masih banyak program serta pelayanan yang tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari BKP Kabupaten Donggala. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Bupati Donggala sangat diharapkan dapat meningkatkan kinerja BKP Kabupaten Donggala agar supaya pelayanan ini dapat berjalan dengan baik terhadap masyarakat Kabupaten Donggala. Karena produktivitas ini adalah salah satu indikator untuk mencapai kinerja yang lebih baik serta menilai keberhasilan kinerja BKP Kabupaten Donggala.

2. Kualitas layanan

Pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah dalam suatu birokrasi pemerintahan sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan kualitasnya rendah. Namun hal ini tidak menjadikan alasan utama untuk tetap pesimis atas perubahan yang mungkin terjadi dalam paradigma pelayanan yang selama ini menempatkan aparat dengan birokrasinya pada posisi yang harus dilayani, tetapi harus berubah kepada paradigma yang menempatkan pengguna jasa (konsumen) pada posisi yang lebih tinggi.

Kualitas layanan cenderung menjadi sangat penting dalam menjalankan organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai kinerja pegawai yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan Publik. Hal ini seperti yang terjadi di BKP Kabupaten Donggala. Berkualitas tidaknya pelayanan yang diberikan ini akan berpengaruh pada kinerja BKP Kabupaten Donggala. Keputusan masyarakat terkait masalah kualitas pelayanan dapat dijadikan indikator kerja organisasi. Kualitas pelayanan yang baik dimiliki pegawai BKP Kabupaten Donggala ini dapat dijadikan salah satu indikator dalam mengukur kinerja BKP Kabupaten Donggala.

Untuk mengetahui seperti apa kualitas pelayanan BKP Kabupaten Donggala maka

peneliti tentunya mewawancarai beberapa informan terkait masalah kualitas pelayanan BKP Kabupaten Donggala. Seperti yang disampaikan Bapak Hari Soetjahyo.S.Pt sebagai Kepala BKP Kabupaten Donggala mengatakan bahwa:

“saya mengakui kualitas pelayanan di BKP Kabupaten Donggala ini belum mencapai kualitas pelayanan yang baik hal ini dapat terlihat pada pendidikan pegawai yang dimiliki serta pengalaman kerja pegawai BKP Kabupaten Donggala yang masih sangat rendah. Sehingga hal inilah yang membuat kinerja BKP Kabupaten Donggala ini tidak berjalan dengan baik karena faktor kualitas pelayanannya yang masih sangat terhitung rendah atau belum mencapai dari standar sesungguhnya”. (wawancara 16 Pebruari 2015)

Ridwan, SP.M.Si selaku Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan BKP Kabupaten Donggala mengatakan bahwa:

“yang membuat kinerja BKP Kabupaten Donggala dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ini sehingga kurang baik ini disebabkan oleh faktor kualitas pelayanan BKP Kabupaten Donggala yang masih sangat rendah. Karena kualitas pegawai dalam hal ini pendidikan serta pengalaman kerja masih relative rendah sehingga tidak heran kemudian ketika kualitas kinerja BKP Kabupaten Donggala ini menggambarkan kinerja yang masih kategori kurang baik”. (wawancara 18 Pebruari 2015).

Penting kiranya dilakukan evaluasi kerja BKP Kabupaten Donggala dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja BKP Kabupaten Donggala menjadi lebih baik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan cita-cita oleh organisasi Pemerintah Kabupaten Donggala. Sehingga kualitas pelayanan yang selama ini dianggap masih buruk dapat menjadi baik dengan dilakukan evaluasi sehingga harapan masyarakat dapat tercapai dengan kinerja BKP Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pemerintah yakni terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Faktor kualitas pelayanan dalam sebuah instansi baik itu instansi swasta maupun pemerintah memang sangat dibutuhkan sebab kualitas pelayanan yang baik adalah salah satu tolak ukur sejauh mana kinerja BKP Kabupaten Donggala dalam pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat pendidikan yang baik itu pendidikan formal maupun non formal sangat penting untuk dimiliki setiap instansi demi terciptanya kinerja pegawai yang berkualitas terhadap masyarakat. Sebab kualitas kinerja pelayanan yang berpendidikan tinggi ini akan dapat menciptakan kinerja pegawai yang baik pula. Oleh sebab itu, pimpinan sangat diharapkan mampu menciptakan kualitas sumberdaya manusia sehingga dengan kualitas sumberdaya inilah yang membuat kinerja BKP Kabupaten Donggala dapat berjalan dengan baik.

Sumber daya manusia yang relative rendah ini akan mempengaruhi terhadap kualitas kinerja BKP Kabupaten Donggala. Oleh karena itu, sumberdaya manusia yang baik ini akan mendukung terhadap kinerja serta kualitas pelayanan yang akan baik pula bagi BKP Kabupaten Donggala. Maka tak heran kemudian ketika kualitas pelayanan ini adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap organisasi pemerintahan kabupaten Donggala khususnya di BKP Kabupaten Donggala yang merupakan fokus dari penelitian tersebut.

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa kualitas kinerja BKP Kabupaten Donggala masih rendah sehingga membuat kinerja BKP Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak berjalan secara maksimal akibat faktor kualitas pelayanan yang relatif rendah. Dan hal inilah yang membuat pelayanan terhadap publik menjadi kurang baik dan tidak terjamin kualitas pelayanannya.

3. Responsivitas

Responsivitas diukur tingkat Kepekaan tugas pekerjaan dengan hasil yang dicapai, dan prioritas terhadap tugas dan pekerjaan yang mendesak serta kesesuaian dengan kebutuhan orang yang dilayani, atau dengan kata lain responsivitas adalah kemampuan BKP Kabupaten Donggala untuk mengenali apa yang menjadi keinginan publik, dan kemampuan untuk menyusun agenda prioritas pelayanan dalam mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Kabupaten Donggala. Secara singkat responsivitas mempunyai arti kejelasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi publik responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dan kebutuhan publik.

Untuk mengetahui sejauh mana responsivitas BKP Kabupaten Donggala dalam hal ini menjalankan tugas pokok dan fungsi BKP mengatasi kerawanan pangan di Kabupaten Donggala, Maka peneliti harus mewawancarai beberapa informan yang dianggap faham dan mengerti dengan tugas Badan Ketahanan Pangan.

Bapak Hari Soetjahyo.S.Pt sebagai Kepala BKP Kabupaten Donggala, mengatakan bahwa:

“saya menganggap pegawai di kantor BKP Kabupaten Donggala telah mempunyai kemampuan mengenali apa yang sudah menjadi keinginan masyarakat dan program-program yang menjadi prioritas yang harus dilaksanakan. Dengan kemampuan inilah yang dapat mempercepat proses kinerja BKP Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayanan terhadap public untuk mengatasi kerawanan pangan di Kabupaten Donggala”. (wawancara, 18 Pebruari 2015).

Responsivitas dalam sebuah organisasi sangat penting untuk dimiliki, karena dengan faktor responsivitas ini adalah salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja BKP Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengatasi kerawanan pangan.

Responsivitas yang baik seperti kemampuan pegawai mengenali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta apa yang menjadi program prioritas yang harus didahulukan untuk dilaksanakan. Sehingga kinerja ini berjalan dengan baik walaupun mungkin kadang kala terjadi hambatan seperti akuntabilitas, kualitas pelayanan dan Produktivitas yang masih rendah.

Responsivitas yang baik ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok serta fungsi BKP Kabupaten Donggala dalam melaksanakan pelayanan publik. Sehingga kinerja dalam berbagai bidang sangat diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Oleh karena itu, faktor responsivitas BKP Kabupaten Donggala menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan demi berjalannya tugas pokok serta fungsi BKP Kabupaten Donggala dalam pelayanan publik di Kabupaten Donggala.

Sementara Suriani, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BKP Kabupaten Donggala mengatakan bahwa:

“saya mengakui pegawai di kantor BKP Kabupaten Donggala sudah cukup mempunyai kemampuan mengenali apa yang menjadi keinginan masyarakat. sehingga dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi dari pada pegawai BKP Kabupaten Donggala berupa pengentasan kerawanan pangan ini tidak lagi merasa kesulitan. Sebab apa yang ingin dikerjakan itu sudah diketahui”. (wawancara, 18 Pebruari 2015).

Faktor responsivitas kinerja Pegawai BKP Kabupaten Donggala dalam pengentasan kerawanan pangan di Kabupaten Donggala ini, sangat berpengaruh terhadap responsivitas yang dimiliki pegawai di BKP Kabupaten Donggala dalam sebuah instansi pemerintahan. Oleh karena itu, reponsivitas dalam diri BKP Kabupaten Donggala sangat penting untuk ditingkatkan demi tercapainya kinerja BKP Kabupaten Donggala yang baik dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Menurut Hariyadi, S.Kom selaku Staf BKP Kabupaten Donggala mengatakan bahwa:

“Kemampuan pegawai BKP Kabupaten Donggala dalam mengenali keinginan publik serta mengetahui program yang harus dijadikan sebagai program prioritas dalam sebuah program. Dan hal inilah yang membuat BKP Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menjadi mudah dalam pelaksanaannya. Karena semua program sudah diketahui dan ini akan memudahkan pegawai menyusun program yang akan didahulukan”. (wawancara, 18 Pebruari 2015).

Responsivitas ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja pada BKP Kabupaten Donggala. Namun Responsivitas ini sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat pada kemampuan pegawai BKP Kabupaten Donggala dalam merespon cepat apa yang menjadi keinginan publik. Sehingga segala program akan dapat diketahui yang mana yang harus menjadi program prioritas dan tidak prioritas untuk dilaksanakan pada program kedepannya di BKP Kabupaten Donggala.

Berjalan baiknya kinerja BKP Kabupaten Donggala ini bergantung pada Kepala BKP Kabupaten Donggala. Kemampuan pimpinan dalam menjalankan roda organisasi ini menunjukkan pada faktor responsivitas yang baik. Sebab responsivitas yang baik ini akan memudahkan BKP Kabupaten Donggala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di Kabupaten Donggala.

4. Responsibilitas

Responsibilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. Sebab responsibilitas ini menyangkut masalah prinsip-prinsip organisasi administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang telah diambil oleh organisasi pemerintahan. Sehingga faktor responsibilitas

ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menilai kinerja BKP Kabupaten Donggala.

Untuk mengetahui seperti apa faktor responsibilitas ini mempengaruhi kinerja BKP Kabupaten Donggala. Maka peneliti mewawancarai beberapa informan sebagai berikut:

Bapak Hari Soetjahyo.S.Pt sebagai Kepala BKP Kabupaten Donggala mengatakan bahwa:

“saya mengakui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKP Kabupaten Donggala sudah cukup baik karena sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan program yang tertuang pada Visi dan Misi BKP Kabupaten Donggala. Kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip administrasi yang dilaksanakan oleh BKP Kabupaten Donggala ini menggambarkan bahwa responsibilitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sudah berjalan dengan baik”. (wawancara, 18 Pebruari 2015).

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang baik yang sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan atau dikenal dengan responsibilitas yang baik ini merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan. Sebab responsibilitas ini merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur sejauh mana kinerja BKP Kabupaten Donggala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Reponsibilitas yang baik tentunya ini akan membuat kinerja akan baik pula tentunya begitupun sebaliknya.

Responsibilitas dalam sebuah organisasi mau pun instansi pemerintahan sangat diharapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKP Kabupaten Donggala. Sebab responsibilitas ini adalah salah suatu indikator dalam mengukur sejauh mana kinerja BKP Kabupaten Donggala dalam melayani publik yang membutuhkan. Kinerja yang baik ini akan menjadi kualitas pelayanan yang akan baik pula kepada publik.

Responsibilitas adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam BKP Kabupaten

Donggala. Karena responsibilitas ini merupakan pelaksanaan sebuah program yang berdasarkan pada administrasi yang benar. Sehingga dengan berjalannya kinerja BKP di Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bergantung pada responsibilitas kinerja pegawai BKP Kabupaten Donggala. Maka dari itu setiap instansi baik itu intansi swasta maupun pemerintah ini wajib mempunyai responsibilitas yang baik sehingga pelayanan terhadap publik ini menjadi baik dan benar sesuai dengan yang diharapkan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan dari hasil wawancara kedua informan diatas telah membenarkan bahwa pelaksanaan kinerja di BKP Kabupaten Donggala sudah berjalan dengan baik, Di mana BKP Kabupaten Donggala dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya sudah berdasarkan pada administrasi yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu responsibilitas ini penting untuk tetap di jaga dan ditingkatkan demi terciptanya kinerja BKP Kabupaten Donggala ini menjadi baik dalam pemberian pelayanan kepada publik. Responsibilitas Yang baik dalam sebuah instansi ini adalah salah satu indikator dalam penilaian kinerja BKP Kabupaten Donggala.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung arti berapa besar kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat yang dipilih kepala daerah. Asumsinya adalah para pejabat tesebut dipilih oleh rakyat melalui kepala daerah. Dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dan akuntabilitas ini pula merupakan suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada dipublik atau yang dimiliki beberapa stokeholder. Oleh karena itu, faktor akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting dimiliki setiap organisasi

pemerintahan maupun instansi lainnya. Sebab akuntabilitas ini juga termasuk didalamnya tanggung jawab. Sehingga kinerja BKP Kabupaten Donggala ini menjadi baik dan ini terkatung pula pada akuntabilitas yang dimiliki. Maka dari itu, untuk mengetahui seperti apa akuntabilitas yang di miliki BKP Kabupaten Donggala peneliti mewawancarai beberapa informan sebagai berikut:

Bapak Hari Soetjahyo.S.Pt sebagai Kepala BKP Kabupaten Donggala mengatakan bahwa:

“memang saya mengakui bahwa masih terdapat pegawai di BKP Kabupaten Donggala yang tidak patuh terhadap aturan yang sudah ada. padahal salah satu yang menjadi ukuran untuk menilai kinerja pegawai dapat dilihat pada kepatuhan pegawai terhadap peraturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya di BKP Kabupaten Donggala masih terdapat pegawai yang melanggar aturan. Sehingga untuk mencapai sebuah kinerja yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik dalam hal ini BKP Kabupaten Donggala”. (wawancara, 16 Pebruari 2015).

Akuntabilitas pimpinan dalam sebuah organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan. Sebab akuntabilitas ini juga didalamnya masalah kepatuhan pegawai terhadap atasan dan akuntabilitas ini pula menyangkut masalah tanggung jawab. Sehingga faktor akuntabilitas ini menjadi salah satu indikator dalam mengukur sejauh mana kinerja BKP Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat itu sendiri.

Sementara menurut Ridwan, SP.M.Si selaku Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan BKP Kabupaten Donggala mengatakan bahwa:

“saya menganggap bahwa akuntabilitas pimpinan dalam memimpin dan mengarahkan pegawai di BKP Kabupaten Donggala ini masih sangat rendah. Hal ini terlihat masih terdapatnya pegawai yang tidak patuh terhadap atasan hal ini disebabkan karena ketegasan dari pimpinan yang tidak terlihat sehingga terdapat beberapa pegawai ini yang terkadang melanggar aturan yang sudah ada dan juga hal ini juga ada

hubungannya dengan tanggungjawab pimpinan terhadap bawahannya yang tidak menggambarkan sebagai mana fungsi dan peran dari seorang pemimpin sebuah organisasi pemerintahan itu sendiri”. (wawancara, 18 Pebruari 2015).

Dalam sebuah organisasi pemerintahan akauntabilitas dari pimpinan ini sangat dibutuhkan, sebab akuntabilitas ini menyangkut masalah tanggungjawab setiap organisasi baik pimpinan maupun bawahan. Sehingga untuk mengukur sejauh mana kinerja BKP Kabupaten Donggala dapat dilihat dari faktor akuntabilitas yang dimiliki pimpinan dalam sebuah organisasi pemerintahan itu sendiri.

Hasil wawancara diatas telah menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan kinerja di BKP Kabupaten Donggala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya belum dapat dikatakan baik. Sebab masih terdapat beberapa pegawai di BKP yang tidak patuh terhadap peraturan misalnya yang sering dilanggar pegawai yaitu jam masuk kantor dan kedisiplinan berpakaian yang masih sangat terlihat jelas dengan dilihat langsung oleh masyarakat. Padahal akuntabilitas ini adalah indikator yang sangat baik untuk diperbaiki dalam setiap instansi baik itu swasta maupun pemerintah. Karena akuntabilitas ini berbicara masalah kepatuhan bawahan terhadap pimpinan dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi BKP. Namun pada kenyataan di kantor BKP Kabupaten Donggala ini bila diukur berdasarkan akuntabilitas maka kinerja pegawai BKP ini belum dapat dikategorikan sudah baik dalam memeberikan pelayanan terhadap masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke lima aspek yang digunakan dalam mengukur kinerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala dalam pelayanan publik yaitu Produktivitas, Kualitas layanan, responsivitas,

responsibilitas, dan Akuntabilitas, Ada tiga aspek yang belum berjalan baik, yakni Aspek Produktivitas, Aspek Kualitas Layanan dan Aspek Akuntabilitas. Padahal ke tiga aspek tersebut sangat berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pada aspek produktivitas masih banyak program serta pelayanan yang tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BKP Kabupaten Donggala. Untuk aspek kualitas layanan, faktor tingkat pendidikan serta pengalaman para pegawai BKP Kabupaten Donggala masih rendah sehingga mempengaruhi dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya. Aspek akuntabilitas tidak berjalan dengan baik, hal ini karena kurangnya pemahaman pegawai yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

Rekomendasi

- a) Aspek Produktivitas, pada BKP Kabupaten Donggala sebaiknya pegawai di BKP Kabupaten Donggala untuk lebih tegas serta bertanggungjawab atas apa sudah yang menjadi program yang telah ditetapkan.
- b) Aspek Kualitas layanan, BKP Kabupaten Donggala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus diperbaiki dari segi kualitas pelayanannya terhadap public, utamanya dalam peningkatan Sumber daya aparatur.
- c) Aspek Akuntabilitas, untuk efektif serta efisiensinya kinerja pada BKP Kabupaten Donggala yang harus ditingkatkan adalah akuntabilitas para pejabat dan jajaran aparat dibawahnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan

karunia-Nya, penyusunan jurnal ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyelesaian tesis dan studi pada Program Studi Magister Administrasi Publik adalah berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Tim Pembimbing Dr.Awat Soulisa,M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Dr.Intam Kurnia, M.Si yang telah mencurahkan segenap waktu dan pikiran dalam membimbing penulis agar dapat menyelesaikan penyusunan tesis.

DAFTAR RUJUKAN

- Dwiyanto Agus, 2006. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Mink. A ale Timpe. 1993. *Seri Manajemen Sumber Daya Manusia (Kinerja/ Performance)*, Cetakan Keempat, PT Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Nurmianto, Eko dan Nurhadi Siswanto. 2010, *Perancangan Penilaian Kinerja Karyawan Berdasarkan Kompetensi Spencer dengan Metode Analitical Hierarchy Process* (Studi Kasus di Sub Dinas Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum, Kota Probolinggo).
- Rivai, Veithzal, Ahmad Fawzi Mohd. Basri, Ella Jauvani Sagala, Silviana Murni. *Performance Appraisal (Sistem Yang Tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan)* Edisi Kedua, Cetakan Keempat, PT Raja Grfindo Persada, Jakarta
- Sianipar, 1999.*Manajemen Pelayanan*, Gramedia, Jakarta.
- Sugiono, 2005.*Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan